

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan untuk memberikan informasi dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Menurut PSAK No. 1, “laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang diukur dalam nilai moneter. Dalam penelitian McDaniel, *et, al* (2002) dalam Gamayuni (2017) menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan yang baik yaitu laporan keuangan yang dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunaannya dalam melakukan pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kemajuan dari sebuah lembaga keuangan karena laporan pendanaan yang tepat akan menghasilkan laporan keuangan yang bermutu. Semakin baik laporan keuangan yang dihasilkan maka semakin tinggi peluang keputusan yang diambil dengan tepat.

Lembaga perkreditan desa (LPD) merupakan sebuah lembaga keuangan non bank yang dasar hukumnya berbeda dengan bank. Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga ekonomi desa yang dipergunakan dalam menyimpan dan penukaran uang di pedesaan (Priantbara, 2019; 1). Peran LPD semakin berkembang dan bidang usahanya semakin luas sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi perekonomian. Tidak hanya melayani penyimpanan dan memberikan kredit, LPD juga sebagai perantara dalam

proses peredaran uang, maupun sebagai sumber pembiayaan pembangunan di wilayah desa adat yang ada di Bali sesuai dengan PerDa Tingkat I Bali No. 2 Tahun 1988. Dalam menjalankan manajemennya, LPD melakukan hal yang sama dengan pemerintah Desa Adat yaitu berdasarkan kekeluargaan dan dalam melakukan pelayanan jasa keuangan dilakukan atas dasar prinsip saling percaya. Pengurus LPD merupakan orang yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah Desa Adat. Pengurus LPD merupakan warga yang berasal dari tiap banjar yang berada dalam satu Desa Adat, dan Badan Pengawasnya terdiri dari seluruh Kelian Banjar Desa Adat yang bersangkutan.

Pemilihan pengurus LPD melalui musyawarah yang dilakukan Desa Adat menjadi suatu kelemahan dalam pengelolaan LPD. Hal tersebut dikarenakan dalam melakukan pemilihan pengurus LPD mereka tidak melihat latar belakang pendidikan yang dimiliki dari masing-masing sumber daya manusianya. Hal itulah yang menyebabkan LPD tidak berjalan dengan baik bahkan ada yang mengalami kebangkrutan. Sebagai lembaga keuangan mikro yang telah berkembang di Bali terdapat 1.463 Lembaga Perkreditan Desa, yang dimana beberapa diantaranya mengalami kondisi yang tidak diinginkan seperti kondisi LPD yang tidak sehat, kurang sehat, dan cukup sehat. Banyak Lembaga Perkreditan Desa yang kurang memperhatikan kualitas laporan keuangan sehingga banyak LPD yang mengalami masalah terkait kesehatan LPD itu sendiri. Tingkat kesehatan LPD menunjukkan kemampuan untuk memanfaatkan aktiva yang dimiliki dengan produktif dan juga mampu mengatur kelangsungan usaha yang dijalankan dengan efektif, sehingga mendorong terjaminnya kontinuitas dari usaha LPD tersebut. Analisis tingkat

kesehatan LPD dilakukan dengan analisis *CAEL*, yaitu faktor yang dianalisis adalah aspek modal, kualitas aktiva produktif, rentailitas dan likuiditas. Kriteria nilai kesehatan LPD yaitu total nilai kesehatan 0-51 dikategorikan tidak sehat, nilai 51-66 dikategorikan kurang sehat. Nilai 66-81 dikategorikan cukup sehat, dan nilai 81-100 masuk dalam kategori sehat.

Tabel 1. 1
Kondisi LPD di Kecamatan Klungkung 2021

No	Nama LPD	Kondisi LPD			
		S	CS	KS	TS
1	Akah			√	
2	Apet				√
3	Bajing		√		
4	Besang Kangin			√	
5	Besang Kawan	√			
6	Budaga			√	
7	Gegel			√	
8	Gembalan	√			
9	Griya Cucukan	√			
10	Jumpai		√		
11	Kemoning		√		
12	Manduang			√	
13	Payungan			√	
14	Sangkan Buana			√	
15	Satra	√			
16	Selat	√			
17	Selisian	√			
18	Semarapura		√		
19	Tabu Banjaran				√
20	Takedan	√			
21	Tangkas	√			
22	Tegak			√	
23	Tulang Nyuh		√		
Total		8	5	8	2

Sumber : LPLPD Kabupaten Klungkung (2023)

Keterangan :

S = Sehat

CS = Cukup Sehat

KS = Kurang Sehat

TS = Tidak Sehat

Seperti yang terjadi di Kecamatan Klungkung dimana pada periode desember 2021 berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Klungkung dari 23 LPD terdapat 2 LPD yang tidak sehat, kurang sehat sebanyak 8 unit, cukup sehat 5 unit, dan sehat sebanyak 8 unit LPD. Untuk menilai kinerja dari LPD diperlukan laporan keuangan yang baik dan lengkap. Manajemen dikatakan berhasil dalam mengelola suatu entitas atau organisasi, dapat kita lihat dari laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan yang berkualitas dalam penyusunannya harus memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem akuntansi yang dirancang untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan mendeteksi penggelapan (Armel, 2017). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa unsur-unsur SPIP meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Apriada dan wulandari (2022) diperoleh hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan dari penelitian Pramesti, dkk (2021) diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pemahaman merupakan suatu kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang di pelajari, sedangkan akuntansi menurut Rudianto (2006) merupakan pengidentifikasi, pengukuran dan pengkomunikasian yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dari kondisi suatu perusahaan. Jadi individu dikatakan paham mengenai akuntansi apabila dapat menjalankan proses akuntansi sampai menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berlandaskan prinsip standar pelaporan keuangan (Aniftahudin, 2019). Dengan adanya pengetahuan tentang akuntansi yang baik dan handal maka kualitas pelaporan keuangan suatu perusahaan itu akan lebih baik dan dapat terhindar dari adanya kesalahan informasi yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pemahaman akuntansi itu sendiri. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dkk (2021) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Bhegawati dan Novarini (2021) diperoleh bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem informasi akuntansi dibentuk oleh suatu perkumpulan atau Lembaga dan bisa menjalankan fungsinya. Artinya, layak untuk menyampaikan data pembukuan yang berkesinambungan, dapat diandalkan, setara dan lugas bagi para pimpinan. Sistem informasi akuntansi membantu dalam pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi suatu perusahaan. Sistem informasi akuntansi sangat berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi

dan aplikasinya dilakukan dengan komputer. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berbasis komputer sebagai salah satu bentuk teknologi informasi telah mengubah pengolahan data akuntansi dari manual menjadi otomatis (Rahmawati, 2008). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gusherinsya dan Samukri (2020) dijelaskan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Ernawatiningsih (2019) kualitas sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Badan pengawas juga memiliki peran penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pada Lembaga Perkreditan Desa. Setiap LPD harus mempunyai badan pengawas yang memadai dan mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan operasional dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang akan dapat merugikan perusahaan dan terjadinya praktek-praktek yang tidak sehat. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, badan pengawas dapat bertindak sebagai auditor internal yang akan mengontrol laporan keuangan agar tidak terdapat manipulasi data dalam laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Ernawatiningsih (2019) mengatakan bahwa fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriada dan Wulandari (2022) mengatakan bahwa fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi akan

membantu mempercepat dan mempermudah proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen buku, jurnal, buku besar, hingga menjadi kesatuan laporan keuangan (Soimah, 2014). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sara (2022), pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Lestari, dkk (2021) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan serta adanya ketidak konsistenan dalam penelitian masing-masing hubungan antara variabel, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, Peran Badan Pengawas, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD di Kecamatan Klungkung”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Klungkung?
- 2) Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Klungkung?
- 3) Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Klungkung?

- 4) Apakah peran badan pengawas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Klungkung?
- 5) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Klungkung?

1.3. Tujuan

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Klungkung
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Klungkung
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Klungkung
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh peran badan pengawas terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Klungkung
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Klungkung

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan dengan pengaruh sistem pengendalian intern, pemahaman akuntansi, sistem informasi akuntansi, peran badan pengawas, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan LPD.

1.4.2. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

- a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan di bidang ekonomi, khususnya akuntansi sektor publik, yang nantinya juga akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya untuk dijadikan informasi.
- b) Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang pengaruh sistem pengendalian intern, pemahaman akuntansi, sistem informasi akuntansi, peran badan pengawas, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Klungkung.

2) Bagi Fakultas dan Universitas

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai bahan acuan di perpustakaan kampus dan dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan yang sama dikemudian hari.

b) Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi sebagaimana yang diharapkan sekaligus menjadi referensi yang memadai untuk penelitian lebih lanjut dengan objek dan kajian yang lebih mendalam mengenai kualitas laporan keuangan LPPD.

3) Bagi Perusahaan (Instansi)

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan pengelola agar dapat membuat laporan keuangan yang sebaik-baiknya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Secara umum, teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara dua pihak dalam suatu perusahaan yaitu principal dan agen. Principal bertindak sebagai pihak yang membuat kontrak atau yang memberi wewenang, dan agen sebagai pihak yang menerima wewenang. Menurut Jensen and Meckling (1976) dalam Zuliarti (2012), menyatakan bahwa teori keagenan adalah suatu kontrak di mana satu orang atau lebih, yang kemudian disebut sebagai principal, menyewa serta memberikan wewenang kepada satu orang atau lebih, yang kemudian disebut agen dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan bagi kepentingan principal. Teori ini berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang dengan pihak yang menerima wewenang.

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal). Masalah keagenan muncul ketika eksekutif atau agen cenderung memaksimalkan kepentingan diri sendiri (*self interest*) dan kewenangan yang dimulai dari proses

penganggaran, pembuatan keputusan-keputusan, sampai dengan melaporkan dan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk posisinya di mata legislatif dan rakyat.

Dalam hubungan keagenan, masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri dimana hal ini dijelaskan oleh Sambera dan Meiranto (2013). Para pemegang saham menginginkan keuntungan atas investasi yang ditanamkan pada perusahaan, sedangkan manajemen menginginkan kompensasi atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Perbedaan kepentingan itu bisa saja menyebabkan timbulnya asimetri informasi. Asimetri informasi adalah ketidak seimbangan informasi yang dimiliki oleh manajemen dan pemegang saham perusahaan karena pihak manajemen lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham, dengan penyampaian laporan keuangan, maka akan dapat meminimalisir asimetri informasi yang terjadi antara pihak manajemen dan pemegang saham, karena laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal perusahaan.

Begitu pula pada LPD, pihak manajemen (pengurus) LPD membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus atas kinerja LPD dalam satu periode akuntansi. Sesuai dengan teori keagenan, informasi yang tercantum dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pengurus LPD selaku pihak agen

berguna sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada pihak principal yaitu desa pekraman bahwa LPD dapat mengelola dana yang ditanamkan dengan baik. Laporan keuangan juga sebagai sumber informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan LPD. Oleh sebab itu kualitas laporan keuangan menjadi hal utama dalam menjaga kepercayaan principal.

2.1.2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Kasmir (2016:7) pengertian laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam satu periode tertentu.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidak pastian yang terkait.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komperhensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

2.1.3. Kualitas Laporan Keuangan

Kasmir (2016) menyatakan bahwa laporan keuangan meliputi neraca, laba-rugi, laopran arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus memiliki kualitas yang baik sehingga dapat menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif yang dimiliki oleh laporan keuangan. Ada empat karakteristik yang merupakan syarat laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas, yaitu :

1) Relevan

Suatu laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan dapat mempengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengkoreksikan hasil evaluasi masa lalu.

2) Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan andal jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3) Dapat dibandingkan

Laporan keuangan dapat dibandingkan artinya informasi yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami

Laporan keuangan dapat dipahami jika informasi yang disajikan dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.4. Lembaga Perkreditan Desa

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Daerah Tingkat 1 Bali No.972 Tahun 1984 yang kemudian dikukuhkan dalam peraturan daerah (Perda) Provinsi daerah Tingkat 1 Bali No.2 Tahun 1998 tanggal 27 Januari dan telah di perbarui lagi dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tanggal 12 September 2002 serta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 yang kemudian dilakukan perubahan kedua dengan peraturan Gubernur Bali No. 11 Tahun 2013 dijelaskan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah suatu wadah kekayaan desa yang menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha kearah

taraf hidup krama desa, dan sesuai dengan undang-undang (UU) No.1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, mengenai keberadaan LPD sebagai lembaga keuangan yang bersifat khusus sehingga peraturannya dikecualikan oleh undang-undang tersebut. Hal ini ditegaskan pada Bab XIII ketentuan peralihan pasal 39 ayat 3 yang berbunyi, "Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Putih Negeri serta lembaga sejenis yang ada sebelum undang-undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada ini".

2.1.5. Sistem Pengendalian Internal

Dalam mengatur kegiatan operasional sebuah organisasi, sangat diperlukan sistem yang baik agar dapat mencegah kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi. Salah satu sistem yang baik untuk sebuah organisasi adalah sistem pengendalian internal. Pengendalian internal meliputi metode dan kebijakan yang terkoordinasi dalam perusahaan untuk mengamankan kekayaan perusahaan, menguji ketepatan, ketelitian dan keandalan catatan atau data akuntansi serta untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa sistem pengendalian Internal adalah proses integral pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Mengecek ketelitian dan keandalan pelaporan keuangan
- 2) Menjaga kekayaan dan catatan organisasi
- 3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
- 4) Efektivitas dan efisiensi operasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 unsur sistem pengendalian Internal dalam Peraturan Pemerintah mengacu pada sistem pengendalian internal yang telah dilakukan di berbagai negara di dalam lingkungan pemerintah yang meliputi :

- 1) Lingkungan Pengendalian (*Control Enviroment*)

Lingkungan pengendalian berhubungan dengan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap manajemen, dewan komisaris, kepemilikan dan pihak lain terhadap pentingnya pengendalian internal bagi entitas. Lingkungan pengendalian membentuk corak dan suasana dalam suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian personil dalam organisasi. Ada beberapa factor yang membentuk lingkungan pengendalian antara lain :

- a) Integritas dan nilai etika

Integritas dan nilai etika merupakan produk dari standar etika dan perilaku entitas dan bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan dan dijalankan dengan praktik.

Menjaga suasana etika organisasi menjadi teladan untuk tindakan-tindakan yang benar.

b) Komitmen terhadap kompetensi

Karyawan yang dipekerjakan oleh manajemen berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki karyawan, dan ditempatkan pada pekerjaan yang tepat sesuai dengan kompetensi. Hal ini bertujuan meningkatkan keefektifan pekerjaan karyawan karena dipengaruhi oleh tingkat keahlian dan pengetahuan yang dimiliki karyawan.

c) Filosofi dan gaya operasi manajemen

Manajemen memberikan tanda yang jelas melalui aktivitas yang dilakukan kepada pegawai tentang pentingnya pengendalian. Pengendalian internal yang dijaga oleh manajemen dengan mengkomunikasikan dukungannya terhadap prosedur pengendalian di seluruh organisasi akan dapat mengoptimalkan efektifitas pengendalian organisasinya.

d) Struktur organisasi

Dalam suatu entitas, struktur organisasi membatasi garis tanggungjawab dan wewenang yang ada, menghubungkan garis komunikasi. Struktur organisasi merupakan bentuk dan sifat unit serta fungsi manajemen dan hubungan pelaporan dengan sub unit.

e) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggungjawab

Komunikasi formal mengenai wewenang dan tanggungjawab dan masalah lain yang berkaitan dengan pengendalian yang sama pentingnya. Hal ini mencakup deskripsi pekerjaan setiap lini organisasi dan pekerjaan yang terkait, dokumen kebijakan yang menggambarkan perilaku pegawai setiap perbedaan kepentingan dan kode etik perilaku formal, dan semacam memo manajemen tentang pentingnya pengendalian dan yang terkait dengan pengendalian.

f) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Dalam sistem pengendalian internal, tidak terlepas dari sumber daya manusia. Pekerja yang kompeten dan dapat dipercaya akan memberikan hasil laporan keuangan yang handal. Walau dengan sedikit pengendalian yang mendukung mereka, pegawai yang jujur dan efisien akan dapat bekerja pada tingkat yang tinggi.

2) Penilaian Resiko

Penilaian resiko merupakan identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya dan juga membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Menurut Indra (2011 : 12) dijelaskan bahwa penilaian resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengolahan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum. Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

3) Kegiatan Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen. Kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif, yang mencakup :

- a) Otorisasi yang memadai
- b) Perencanaan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai
- c) Pengecekan secara independen
- d) Pemisahan fungsi yang memadai
- e) Pengendalian fisik atas kekayaan pemda dan catatan
- f) Peninjauan atas kinerja

4) Informasi dan Komunikasi

Kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan pecegahan terjadinya salahh saji potensial terhadap pernyataan manajemen dalam laporan keuangan (Indra : 2011). Instansi

Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5) Pemantauan

Menurut Indra (2011) proses penilaian kualitas kinerja dari struktur pengendalian internal sepanjang waktu. Dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Tujuan pemantauan adalah untuk menentukan apakah pengendalian masih berjalan sesuai dengan tujuan yang dicapai atau ada perbaikan. Perlunya ada perbaikan atau modifikasi pada pengendalian internal disebabkan adanya perubahan entitas yang semakin luas dan kompleks, adanya penambahan dan pengurangan pegawai yang menyebabkan personalia baru bergabung perlu adanya adaptasi, pelatihan dan supervise.

2.1.6. Pemahaman Akuntansi

Menurut *American Accounting Association* (AAA) Akuntansi merupakan salah satu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi dengan memungkinkan adanya sebuah penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (Lutfi, 2007).

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia (Poerwadarmita, 2006) paham mempunyai pengertian pandai dan mengerti, sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan, ini berarti orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kelembagaan Perkreditasi Desa.

2.1.7. Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Dandagon dan Rufai (2013) dalam Zamzami, dkk (2021; 3) sistem informasi merupakan seperangkat kesatuan dari suatu subsistem saling terkait yang saling bekerja bersama untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan, mengubah, dan mendistribusikan informasi untuk perencanaan, pembuatan keputusan dan pengadilan. Sistem Informasi Akuntansi didefinisikan sebagai suatu alat yang terintegrasi di lapangan dengan sistem informasi dan teknologi suatu perusahaan.

Menurut Susanto (2013) kualitas sistem informasi akuntansi adalah efektifitas berkaitan dengan relevansi suatu informasi dalam mendukung sistem informasi akuntansi termasuk

didalamnya harus disajikan dalam waktu yang tepat, akurat, konsisten, dapat digunakan dan lengkap. Semakin baik kualitas sistem informasi akuntansi maka akan semakin baik pula kualitas pelaporan keuangan yang di hasilkan, dan semakin rendah kualitas sistem informasi akuntansi maka semakin rendah juga kualitas pelaporan keuangan.

2.1.8. Peran Badan Pengawas

Peran badan pengawas internal sebagai pengawas internal sangat strategis, disamping sebagai auditor internal juga sebagai partner yang bersinergi untuk memajukan LPD. Sesuai dengan pasal 1 ayat (11) Peraturan Nomor 3 Tahun 2007 yang dimaksud dengan pengawasan internal adalah Badan Pengawas yang dibentuk oleh desa dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelola LPD. Peran badan pengawas internal dalam mengawasi oprasional LPD bisa dilakukan oleh siapa saja di desa pakraman bersangkuran tanpa mengenal jenjang dan jenis pendidikan. Badan Pengawas Internal sering disebut dengan Badan Pengawas Desa yang secara kelembagaan harus memahami seluruh elemen pengendalian yang terdiri dari :

1) Evaluasi Pengelolaan Rasio

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi rasio signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelola resiko dan sistem pengendalian.

2) Evaluasi Pengendalian

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisien, dan efektifitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian internal secara berkesinambungan.

3) Evaluasi Proses *Governance*

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *governance* dalam mencapai tujuan. Selain itu audit internal harus mengevaluasi rancangan implementasi, dan efektivitas dari kegiatan program, sasaran organisasi yang berhubungan dengan etika.

Menurut keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 491 Tahun 1998 mengenai pembentukan dan kedudukan Badan Pengawas adalah sebagai berikut:

- 1) Ditiap-tiap LPD dibentuk badan pengawas LPD,
- 2) Badan pengawas terdiri dari seorang ketua dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota,
- 3) Bendesa adat sebagai ketua badan pengawas,
- 4) Ketua dan anggota badan pengawas tidak dibenarkan merangkap sebagai badan pengurus LPD.

Tugas dari Badan Pengawas LPD adalah::

- 1) Mensosialisasikan keberadaan LPD,

- 2) Memotivasi dan meningkatkan kinerja LPD,
- 3) Mengawasi proses penyaluran kredit dan penanganan kredit macet atau bermasalah,
- 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara periodik atau terjadwal serta identitas sesuai dengan program kerja Badan Pengawas.

Seorang pengawas LPD memiliki tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Tanggungjawab tersebut dibagi dalam 4 (empat) fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi Perencanaan

Dalam fungsi perencanaan pengawas harus terlibat dalam menetapkan rencana operasi yang terintegrasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta menganalisis dan mengkomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat dalam manajemen LPD. Salah satunya yaitu program kerja.

- 2) Fungsi Pengendalian

Dalam fungsi pengendalian pengawas harus mengembangkan dan menetapkan norma-norma sebagai ukuran pelaksanaan dan menjadikan pedoman kepada manajemen dalam menjamin adanya penyesuaian hasil pelaksanaan dengan rencana yang ditetapkan, yang selanjutnya perlu diadakan analisis perbandingan antara pedoman dengan realisasi secara menyeluruh.

- 3) Fungsi Pelaporan

Dalam fungsi pelaporan pengawas perlu menyusun, menganalisis dan menginterpretasikan hasil-hasil yang dicapai oleh manajemen untuk selanjutnya dilaporkan dalam rapat rutin yang dilakukan secara periodik dan terprogram. Pengawas dan manajemen dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan dan secara bersama pula dapat memikirkan jalan keluar yang harus dilakukan apabila ditemukan kendala operasional dilapangan.

4) Fungsi Akuntansi

Dalam fungsi akuntansi pengawas ikut melaksanakan, menetapkan, dan memelihara sistem akuntansi pada semua jenjang dan usaha LPD agar terjamin kewajaran semua transaksi keuangan sesuai dengan pengendalian internal yang baik. Fungsi ini meyakinkan pengawas bahwa setiap transaksi yang terjadi di LPD telah dicatat tepat waktu, telah diotorisasi oleh yang berwenang dan dilaksanakan oleh orang yang tepat.

2.1.9. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data,

sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Teknologi informasi menurut Kelton and Robin dalam Paramitha dan Dharmadiaksa (2019) meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa mendatangkan kemampuan untuk yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

2.2. Penelitian Sebelumnya

- 1) Apriada dan Wulandari (2022) variabel independen : penerapan sistem informasi akuntansi, pengendalian intern, penggunaan teknologi informasi, dan fungsi badan pengawas. Variabel dependen : kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yang sebelumnya diuji asumsi klasik. Hasil penelitiannya yaitu variabel penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Ubud. Sedangkan variabel penggunaan

teknologi informasi dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Ubud.

- 2) Andari, Novitasari, Dewi (2022) variabel independen : etika kepemimpinan, kualitas sistem informasi akuntansi, fungsi badan pengawas, tingkat pemahaman akuntansi, dan budaya organisasi. Variabel dependen : kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya yaitu kualitas sistem informasi akuntansi, tingkat pemahaman akuntansi, dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan etika kepemimpinan dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Blahbatuh.
- 3) Sara (2022) variabel independen : kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi. Variabel dependen : kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD.
- 4) Letisya dan Nuratama (2022) variabel dependen : pemahaman akuntansi, sistem pengendalian internal, dan teknologi informasi. Variabel dependen : kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman akuntansi, sistem pengendalian internal, dan teknologi informasi

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan LPD Se-Kota Denpasar.

- 5) Pratiwi, Novitasari, dan Widhiastuti (2021) variabel independen : tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas, profesionalisme, dan etika kepemimpinan. Variabel dependen : kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pemahaman akuntansi dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan profesionalisme dan etika kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Marga.
- 6) Daniarsa (2021) variabel independen : kualitas sumber daya manusia, manfaat teknologi, dan sistem pengendalian intern. Variabel dependen : keterandalan pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu kualitas sumber daya manusia, manfaat teknologi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada LPD Se-Kecamatan Pupuan.
- 7) Lestari, Kusumawati, Nuratama (2021) variabel independen : pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. Variabel dependen : kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik uji statistik deskriptif dan analisis *Partial Least Squares* (PLS). Hasil dari penelitian ini adalah variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian

internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan LPD Se-Kecamatan Penebel.

- 8) Pebriantari dan Andayani (2021) variabel independen : tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas dan pemanfaatan teknologi informasi. Variabel dependen : kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu fungsi badan pengawas dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan LPD Se-Kecamatan Gianyar.
- 9) Pramesti, Endiana, dan Ardilia (2021) variabel independen : pengaruh sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, tingkat pemahaman akuntansi, dan *good corporate governance*. Variabel dependen : kualitas laporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem informasi akuntansi, tingkat pemahaman akuntansi, dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- 10) Bhegawati dan Novarini (2021) variabel independen : etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, dan tingkat pemahaman akuntansi. variabel dependen : kualitas pelaporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah etika kepemimpinan, fungsi

badan pengawas dan pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan LPD di Kota Denpasar.

